



Program Kerja Paslon Belum Memihak Disabilitas

YOGYAKARTA – Program kerja yang ditawarkan dua pasangan calon wali kota-wakil wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono-Achmad Fadli dan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi dinilai belum berpihak kepada penyandang disabilitas.

"Saya belum mendengar *road map* dan konsep yang jelas dari kedua paslon untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi," kata Muhammad Joni Yulianto, Direk-

tur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigap) Yogyakarta, usai mengikuti debat publik putaran terakhir Pilwali Kota Yogyakarta 2017, kemarin petang.

Menurutnya, jika ingin mewujudkan kota inklusi, mau tak mau kepala daerah terpilih nantinya wajib membuka ruang bagi penyandang disabilitas maupun kaum difabel untuk urun rembug. Terutama terkait kebutuhan apa saja

yang perlu difasilitasi oleh Pemkot Yogyakarta sehingga Kota Yogyakarta benar-benar ramah terhadap penyandang disabilitas dan difabel.

"Harus membuka ruang partisipasi publik. Seluruh pelayanan harus aksesibilitas bagi disabilitas dan difabel. Dari debat kedua paslon, saya melihat program yang ditawarkan masih di permukaan, belum menyentuh dan menjawab persoalan," sebut pria penyan-

dang tuna netra ini.

Meski fasilitas umum sudah ada yang memberikan hak bagi penyandang disabilitas dan kaum difabel, namun hingga kini Kota Yogyakarta belum memiliki regulasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan difabel karena rancangan peraturan daerah masih alot digodok di tingkat dewan. Sehingga jaminan untuk mengakses pelayanan publik seperti kesehatan dan pendi-

dikan belum ada payung hukumnya.

Dalam debat yang dimoderatori oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati, kedua paslon diminta memaparkan program kerja terkait kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik termasuk di dalamnya pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Ke Hal 14

Disabilitas

((Dari Hal 13

Moderator menyajikan data tingginya belanja daerah yang mencapai Rp1 triliun pada 2012 dan melonjak menjadi Rp1,5 triliun pada 2015. Sementara pendapatan daerah naik dari Rp1,15 triliun pada 2012 menjadi 1,43 triliun pada 2015. Namun demikian, tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena tercatat penurunan angka kemiskinan hanya 1,3% kurun 2010 - 2016. Selain itu, indeks ketimpangan justru naik dari 0,3% pada 2011 menjadi 0,41% pada 2014.

Calon wali kota nomor urut satu Imam Priyono menilai perlu adanya penelitian untuk memastikan apa kesalahan pemerintah sehingga terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Kalangan akademisi akan digandeng untuk meneliti permasalahan tersebut termasuk menggalai masukan dari masyarakat. Sementara calon wali kota nomor urut dua Haryadi-Heroe mengatakan kesejahteraan baru bisa dinikmati setidaknya dua-tiga tahun ke depan karena selama periode kepemimpinannya kemarin fokus membenahi infrastruktur yang diklaimnya bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kedua paslon juga dicecar komitmen perbaikan pelayanan publik karena jumlah keluhan pelayanan publik terutama di sektor pendidikan, pertanahan, perizinan, dan kesehatan meningkat dari 98 kasus pada 2015 menjadi 110 kasus di 2016, tertinggi se-DIY. Wakil

wali kota nomor urut satu, Achmad Fadli menegaskan perlunya transparansi prosedur pelayanan dan memperbaiki saluran komunikasi antara masyarakat dengan birokrat. Sementara wakil wali kota nomor urut dua Heroe Poerwadi menyebut keluhan adalah bentuk partisipasi masyarakat sehingga upaya meresponnya adalah dengan tidak saling lempar tanggung jawab antar pejabat.

Isu Perizinan Hotel Kembali Bergulir

Yang menarik, dalam sesi tanya jawab, pertanyaan yang dilontarkan salah satu calon wali kota melenceng dari tema yang diajukan moderator yaitu komitmen mewujudkan kota inklusi. Hal itu terjadi saat Imam Priyono bertanya kepada Haryadi Suyuti terkait isu adanya makelar atau broker perizinan hotel. "Di Yogyakarta beredar izin hotel izin apartemen ada brokernya, ini artinya ada ketidaktransparanan pemerintah. Bagaimana Pak Haryadi agar isu ini tak muncul di masyarakat," kata Imam.

"Walaupun pertanyaan tak sesuai dengan tema kota inklusi, tapi ingin saya sampaikan bahwa bangun transparansi adalah kebutuhan pemerintah. Ke depan, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang melayani masyarakat. Proses perizinan saat ini bisa diakses masyarakat bisa dipantau melalui *handphone* sampai mana prosesnya berjalan. Syarat jelas, waktu jelas, biaya jelas," jawab Haryadi.

• ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005